

DIDAKTIKA

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Never Ending Problems of Spoken Error Correction in English
Language Learning (Revisited)

Hairus Salikin

Partisi Sebuah Himpunan dengan Bilangan Stirling Jenis Kedua untuk
Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Matematika Semester II
Program Studi Pendidikan Matematika

Christine Wulandari S

Cubic Curriculum for School Based Management Implementation

Fitrotul Mufaridah

Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan Pendekatan Keteladanan
Kisah-Kisah Sahabat di MTs Baitul Arqom Kecamatan Balung
Kabupaten Jember

Siti Nursyamsiyah

Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Guru Agama di SDN Kecamatan Sumpalsari

Sunarsih

Penguatan Karakter Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menghadapi Tantangan Global

Abd. Jabar Abdul

Penerbit

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

ISSN 1858-0084



9 771858 008494

REDAKSI:

Penanggung Jawab
Henri Fatkurrochman, SS, M.Hum

Pimpinan Redaksi:
Dr. Hanafi, M.Pd

Sekretaris
Dra. Sawitri Komariyanti, M.S

Dewan Redaksi:
Drs. Tanzil Huda, M.Pd
Dra. Tri Endang Jatmikowati, M.Si
Drs. Abu Sofyan
Drs. Kukuh Munandar, M.Kes
Yerry Mijianti, S.S.

Dewan Penyunting:
Prof. Dr. H. Suparmin, M.A (UJ)
Prof. Dr. Samudji, M.A (UJ)
Dr. Moh. Hatip, M.Pd (Unmuh Jember)
Dr. Susilo, M.Pd (Univ. Mulawarman)

Sirkulasi:
Sukardi, Andriya N., S.E,

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penerbitan volume 7 no. 1 Jurnal *Didaktika* dapat terlaksana dengan lancar.

Pada edisi ini, *Didaktika* berisi 3 (tiga) artikel hasil penelitian dan 3 (tiga) artikel analisis kritis. Pada edisi ini, artikel-artikel yang terbit meliputi masalah-masalah konsep pendidikan, pengajaran dan desain instruksional, serta analisis sastra.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Segenap Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Staf Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Para penulis yang telah menyumbangkan naskahnya.

Pada edisi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu dewan redaksi mengharapkan saran dan kritik bagi kemajuan *Didaktika* pada edisi selanjutnya. Dewan redaksi juga mengharapkan partisipasi para dosen, guru, dan pemerhati pendidikan dan pembelajaran untuk mengirimkan naskahnya, baik hasil penelitian maupun analisis kritis. Partisipasi tersebut akan sangat membantu kelancaran dan keberlanjutan *Didaktika*.

Jember, April 2011

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

1. Never Ending Problems of Spoken Error Correction in English Language Learning (Revisited)
Hairus Salikin 1- 18
2. Partisi Sebuah Himpunan dengan Bilangan Stirling Jenis Kedua untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Matematika Semester II Program Studi Pendidikan Matematika
Christine Wulandari S 19 - 29
3. Cubic Curriculum for School Based Management Implementation
Fitrotul Mufaridah..... 31 - 41
4. Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan Pendekatan Keteladanan Kisah-Kisah Sahabat di MTs Baitul Arqom Kecamatan Balung Kabupaten Jember
Siti Nursyamsiyah 43 - 56
5. Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Agama di SDN Kecamatan Sumbersari
Sunarsih 57 - 65
6. Penguatan Karakter Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Tantangan Global
Abd. Jabar Abdul..... 67 - 78

PENGUATAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Abd. Jabar Abdul ⁶⁾
Jurusan Syariah IAIN Ambon,
email: handal_jepit78@yahoo.co.id

Abstract: Facing globalization era and multidimensional crisis forces us to strengthen our nation character. That is why citizenship education becomes the main choice to improve the quality of citizens. This paper tries to describe how citizenship education responsible developing some values such as nation survive, democracy, law and human right. In this case the role of teachers and lecturers of PKn is essentially needed as models of understanding and mastering that value.

Keywords: PKn, citizenship education, human right.

PENDAHULUAN

Bung Karno sebagai negarawan dan proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah menyatakan betapa pentingnya pembangunan karakter bangsa, *nation and character building*, agar bangsa ini memiliki harga diri dan bangsa yang berdaulat. Selanjutnya, Indonesia tidak dipandang rendah oleh bangsa lain dalam percaturan politik dunia. Pada kesempatan yang lain, beliau menegaskan bahwa, “Kita ingin mendirikan negara semua buat semua, bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara satu golongan, walaupun kaya. Namun, kita mendirikan negara, semua untuk semua”.

Damardjati Supadjar (dalam Koesman, 2009) menyatakan apabila kita mencermati perjalanan hidup bangsa ini, selama satu dasawarsa di era reformasi, nampak adanya indikasi bahwa bangsa ini telah kehilangan stamina dan jati diri sebagai bangsa Timur yang memiliki falsafah hidup yang adiluhung, yaitu Pancasila. Akibatnya kondisi negeri ini semakin carut-marut.

Kondisi yang paling mengesankan bagi bangsa Indonesia saat ini, adalah ketika rakyat hanya dijadikan objek dan “tambel

butuh". Rakyat selamanya tetap hidup dalam kemiskinan. Yang hidup mewah hanya kaum elite politik dan elite kekuasaan. Penyebabnya adalah karena kaum elite sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa Timur yang memiliki budaya yang adiluhung. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah banyak terabaikan. UUD 1945 telah diamandemen empat kali. Tapi amanat penderitaan rakyat terus diingkari, dan cita-cita perjuangan kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi semakin kabur dan terus dikhianati. Politik kebangsaan telah berubah menjadi politik kepentingan. Akibatnya, orang sudah tidak lagi memikirkan bangsanya. Mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

Arus globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah membuat negara-negara di dunia ibarat sebuah desa buana dalam mengakses berbagai peristiwa dan proses transformasi nilai-nilai budaya. Dunia telah menjadi suatu kampung global menurut Marshall McLuhan (dalam Tilaar, 2007:261). Vaclav Havel mensinyalir, bahwa kita sekarang ini hidup dalam sebuah peradaban global, dan bahwa hal ini tidak lebih dari sekedar selubung tipis yang menutupi atau melingkupi berbagai bentuk budaya yang begitu beragam dari orang-orang, wilayah-wilayah keagamaan, tradisi-tradisi historis dan sikap-sikap yang terbentuk oleh sejarah (Huntington, 1996:74).

Sementara itu, orang-orang non-Barat dipandang sebagai yang tidak termasuk dalam sebuah kebudayaan universal. Selanjutnya, ide yang dikembangkan adalah bentuk-bentuk budaya Barat yang dipandang sebagai kebudayaan populer di seluruh dunia yang kemudian menciptakan kebudayaan universal. Dengan kata lain, Barat (Amerika) dengan para sekutunya ingin memaksakan agar peradaban mereka yang sekuler-liberal menjadi peradaban universal yang disusupkan untuk mempengaruhi dan bila perlu menggeser dan menggantikan nilai-nilai budaya lokal (nasional).

Dalam menghadapi tantangan global, perlu segera dibangkitkan kekuatan moral, *moral force* untuk melawan musuh-musuh ideologi, ekonomi, budaya dan politik. Semangat kebangsaan, politik kebangsaan, dan jati diri bangsa juga perlu ditegakkan kembali agar bangsa ini dapat kembali sepenuhnya berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Agar kita menjadi bangsa yang kuat, maka kita harus memulai upa-

ya untuk bangkit kembali. Bangkit dari keterpurukan dengan membangun karakter bangsa melalui peningkatan dan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), di samping pendidikan agama dan kesadaran taat hukum bagi generasi dan masyarakat bangsa.

GLOBALISASI DAN PERLUNYA PENGEMBANGAN Pkn

Benturan antarperadaban dalam *setting* globalisasi yang menjadi *entry point* karya Huntington (2009), memberi gambaran bahwa fakta-fakta kehidupan sosial, ekonomi, politik yang terus mengalir melalui titik singgung peradaban global merupakan tantangan besar bagi pendidikan kewarganegaraan untuk bagaimana merespon persoalan yang ada. Setidaknya, PKn dapat berkontribusi dalam mengawal kemandirian generasi, mempertebal semangat nasionalisme, memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa. PKn tidak semata dilihat sebagai suatu proses didaktik metodik yang sarat dengan nilai-nilai kebangsaan dan keadaban yang jauh melangit tapi sulit membumi.

Mark Rupert (dalam Husaini, 2005:21), menjelaskan bahwa globalisasi adalah proyek politik dari kekuatan sosial dominan dan akan selalu problematis dan mendapat tantangan; “Tak ada alasan untuk mempercayai bahwa globalisasi liberal bersifat tak terhindarkan...(globalisasi liberal) itu telah menjadi proyek politik sebuah konstelasi kekuatan-kekuatan sosial dominan yang telah diketahui, ia juga telah, dan akan terus, membuat masalah secara politik dan dapat dilawan”.

Hampir tidak ada bangsa di dunia dewasa ini yang bisa bebas dari pengaruh globalisasi. Penyebaran budaya Barat (Amerika) yang berciri materialisme, hedonisme, dan konsumerisme saat ini telah mengarah pada hegemonisasi budaya *food* (makanan), *fun* (hiburan), *fashion* (mode) dan *thought* (pemikiran). Anthony Giddens (dalam Husaini, 2005:20) mencatat, “Globalisasi sesungguhnya merupakan satu set proses yang rumit, tidak tunggal. Segala proses ini bekerja dengan cara yang saling berlainan arah”.

Cara pandang sekuler-liberal gaya Barat diglobalisasi sebagai bagian dari upaya pelestarian hegemoni budaya Barat (Amerika). Demokrasi liberal mengharuskan sekularisasi dan sekaligus pluralisme. Proses imitasi terhadap pola pikir dan budaya dominan Barat, telah memuluskan program hegemoni di bidang bisnis dan

ekonomi. Dengan meminum Coca-Cola atau menyedot Marlboro, mengenakan jeans, mendengar musik rap, seseorang merasa seolah telah menjadi manusia global (Husaini, 2005:17). Sebaliknya, Amerika bersikap antagonistik terhadap Jepang ketika warga Amerika meminati produk Jepang. Karena arogansi itu, orang Barat menganggap non-Barat akan menjadi kebarat-baratan dengan mengonsumsi produk Barat. Mereka memandang budaya imperialisisme barat telah bangkit dan mereka selalu mewaspadaikan keberlangsungan hidup dan integritas kebudayaan mereka (Huntington, 2009: 77).

Hegemoni Amerika dalam dunia hiburan dan pembentukan budaya global, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penjajahan budaya oleh Amerika. Industri film Amerika dengan berbagai stasiun TV-nya mendominasi pembentukan budaya global. Di balik itu semua, mereka mempromosikan kepentingan Amerika dengan mengeksplor modernitas dan mempropagandakan konsumerisme. Globalisasi adalah suatu masyarakat post-kapitalis yang mendorong kapitalisme dengan mempromosikan sejumlah karakteristik dari kapitalisme. Seperti diketengahkan Holton (dalam Husaini, 2005: 21), “Tesis tentang Amerikanisasi adalah sesungguhnya kapitalisme dan bukannya Amerikanisme yang telah terglobalisasi”.

Hanya cara berpikir yang sudah *ter-Westernized* yang memungkinkan seorang muslim menggilai mode “polos tengah” yang mempertontonkan perutnya, rambut dicat warna-warni, dan aurat diumbar tanpa perhitungan. Rok mini dan jeans ketat mendominasi sebagian kalangan remaja. Bukan karena pakaian itu nyaman dan sehat, melainkan sebagian artis idola yang dipuja telah mempopulerkannya. Mode datang silih berganti. Manusia terus dijejali cara berpikir materialistis, hedonis, dan pragmatis untuk melahap apa saja, menikmati hidup, tanpa peduli apakah cara hidup yang dilakukannya menghancurkan nilai-nilai agama, budaya, nasionalisme dan kepribadian bangsa atau tidak.

Djahiri (2006) menulis bahwa saat ini gejolak iptek yang kian ganas melalui multimedia. Media elektronik-cetak dengan segala keindahan-kemewahan dan kemudahannya yang serba “waah” berikut tuntutan materialnya yang cukup tinggi, melahirkan kehidupan keluarga yang sarat keinginan dan kesibukan. Pola kehidupan modern (*life style*) yang pada akhirnya secara perlahan namun pasti membawa ke arah rasionalisme, sekularisme yang mate-

realistis dan egoistis. Hal tersebut mulai menggeser dan mengerosi standar yang ada, termasuk dalam kehidupan keluarga kita (Djahiri, 2006:5).

Wahab (2009) menjelaskan bahwa “keterpurukan” bangsa saat ini adalah karena kita telah kehilangan jati diri bangsa yang dengan itu pada masa lalu bangsa kita amat disegani dan dihormati, terutama di kawasan ini. Jati diri bangsa yang digambarkan sebagai “kepribadian bangsa” adalah pengamalan nilai-nilai moral dan norma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi keadaan seperti itu, dibutuhkan upaya pemahaman baru kebangsaan. Hal tersebut berguna untuk meniti jalan memahami dan memaknai kembali pengertian wawasan kebangsaan. Selain itu, berguna pula untuk memantapkan kembali jati diri bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa telah memunculkan eksese negatif yang berupa krisis jati diri kebangsaan yang melahirkan krisis multidimensional dan melanda bangsa Indonesia. Selain itu, terjadi pula kompleksitas tantangan seperti menguatnya budaya konsumerisme dan kekerasan, menipisnya kesadaran pluralisme dan semangat kebangsaan, tingginya kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasinya, Buwono X (2007) mencestuskan tidak ada pilihan lain, kecuali merajut kembali keindonesiaan kita. Tentunya dalam hal ini bagaimana agar PKn dapat memulihkan sikap, mental dan psikologi generasi muda bangsa, memperkokoh dan mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

PEMBELAJARAN PKn DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3 menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Pendidikan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa fungsi pemanusiaan, pencerdasan diri, sosial, negara dan bangsa. Secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan secara makro (luas) pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. Selain itu pendidikan bisa juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang (Mahfud, 2009:49).

Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosio-kultural. Karena itu, inti dari pendidikan termasuk pendidikan Pancasila ialah belajar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai Pekerjaan Rumah (PR) yang masih banyak. Di antaranya, tugas untuk membangun *civic education* bagi sekolah maupun mengembangkan *citizenship education* sebagai program pendidikan. Hal itu berujung pada perubahan perilaku yang matang baik secara psikologis maupun sosio-kultural (Winataputra, 2009).

Warga negara yang baik, tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga harus memiliki sikap-sikap modernitas dan produktivitas. Untuk menjadi produktif, manusia bukan hanya memerlukan keterampilan, keahlian, dan penguasaan iptek, tetapi mampu mengubah dan memiliki sistem nilai budaya modern. Sistem nilai budaya mempengaruhi sikap mental dan mentalitas manusia sebagai landasan perilakunya sehari-hari, termasuk tingkat produktivitasnya (Suryadi, 2009).

Belajar dari pengalaman sejarah, dahulu kita pernah memiliki rasa nasionalisme yang begitu tinggi menjelang dan awal kemerdekaan, setidaknya karena tiga hal: 1) rasa solidaritas yang sangat tinggi untuk menghadapi dan mengusir penjajah sebagai musuh bersama; 2) ingin mandiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka; 3) karena penjajahan, bangsa ini menderita, merasa senasib. Oleh karena itu, kita bangkit berjuang bersama (Buwono X, 2007).

Musuh bersama kita sebenarnya masih ada, bahkan lebih kompleks. Kalau dulu yang menjajah dan merampok kekayaan bangsa dan negara adalah penjajah asing. Sekarang, bangsa kita sendiri yang membuat rakyat miskin, kualitas pendidikan rendah, layanan kesehatan tidak merata, anak terlantar yang sangat mem-

prihatinkan, pengangguran dan kekerasan di mana-mana. Semuanya menunjukkan bahwa cita-cita perjuangan bangsa sebagai amanat kemerdekaan belum dapat terlaksana secara baik. Korupsi seolah telah menjadi pilihan kebanyakan pejabat yang berkesempatan. Budaya hukum masyarakat lemah. Penegakan hukum belum memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat. Paragmentasi kebijakan pemerintah dan implementasi pembangunan masih lebih berorientasi dan didominasi pada nuansa kepentingan politik para elit birokrat dan kelompok atau partai politik, ketimbang masyarakat.

Rakyat sebenarnya sudah mencapai titik jenuh melihat carut marutnya wajah perpolitikan Indonesia sekarang ini. Kinerja elit politik tetap tidak berubah, meski zaman, situasi dan penguasa telah berganti. Meskipun sistem pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung dan telah memperoleh mandat rakyat secara legitimed. Elit politik selalu kompak dan sama, hanya dalam memperjuangkan kepentingan pribadi, golongan atau partainya, sedangkan kepentingan rakyat hanya terucap sewaktu kampanye berlangsung. Problem-problem aktual yang serupa itu harus mendapat perhatian komunitas PKn. Karena itu, kajian-kajian dan pembelajaran PKn baik sejak SD hingga perguruan tinggi, maupun di ranah praktis dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, seyogyanya menjadi momentum pengembangan konsep kewarganegaraan dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dan keberjuangan dalam memperkokoh karakter bangsa.

Karena itu, *citizenship education* atau *civic education* seyogyanya memiliki jati diri (Winataputra, 2007). Keduanya perlu diorganisasikan secara lintas-bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif; isi dan prosesnya dikaitkan pada kehidupan nyata; diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah. Jati diri tersebut secara konseptual mencerminkan konsep “*thick citizenship education*” yang merujuk pada kontinum “*education for citizenship*”.

Mereduksi misi yang dikembangkan oleh “*Center for Civic Education*” (CCE), maka PKn harus menjalankan misi meningkatkan upaya pengembangan partisipasi yang cerdas dan bertanggung

jawab dari warga negara dengan kepedulian penuh terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional. Pada gilirannya, hal tersebut dapat memfasilitasi berkembangnya warga negara yang cerdas, kompeten dan bertanggung jawab (Winataputra, 2007).

Tujuan *CCE* jelas telah tercermin secara keseluruhan tentang upaya pedagogis, yaitu: 1) untuk memperkuat komitmen terhadap cita-cita, nilai dan konsep demokrasi konstitusional, 2) mengembangkan sikap warganegara yang menopang partisipasi, preservasi, dan pengukuhan demokrasi, 3) memfasilitasi warganegara untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan politik dan pemerintahan, 4) mengembangkan pemahaman tentang jalannya pemerintahan konstitusional, termasuk proses pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara, 5) memberikan kesempatan kepada siswa-mahasiswa untuk menilai, memilih, dan mempertahankan posisinya atas dasar pertimbangan etika dalam menghadapi berbagai konflik dalam masyarakat, 6) membelajarkan siswa- mahasiswa bagaimana memantau proses politik dan bagaimana mempengaruhi politik dan pemerintahan, 7) memberikan kesempatan kepada siswa-mahasiswa untuk mengamati dan berinteraksi dengan para pemuda dan orang dewasa yang menjadi figur dalam masyarakat dan 8) berperan dalam membangun sistem politik yang sehat. Jadi, menurut model *CCE*, yang menjadi fokus utama tujuan, isi dan proses pendidikan dari "*Civic Education*" adalah proses pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negara melalui berbagai bentuk interaksi dalam praktis demokrasi di sekolah dan dalam masyarakat.

Winataputra (2008) menjelaskan bahwa dalam konsep pembelajaran, pada tataran aplikatif, hal mendasar yang perlu dipahami terhadap insan adalah mengenai tugas, tanggung jawab, dan panggilan pertama seorang manusia menjadi pembelajar. Sedangkan pelajaran pertama dan terutama yang perlu dipelajarinya adalah belajar menjadikan dirinya semanusawi mungkin. Manusia pembelajar itu dikonsepsikan sebagai: 1) berusaha mengenali hakekat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban tentang pertanyaan; "Siapakah aku?" "Darimanakah akau datang?" "Kemanakah aku akan pergi?" "Apakah yang menjadi tanggung jawabku dalam hidup ini?" dan "Kepada apa dan siapa yang harus dipercaya dan diperangi?"; 2)

berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensinya untuk mengekspresikan dan menyatakan dirinya sepenuhnya, seutuh-utuhnya, dengan cara menjadi dirinya sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang “bukan dirinya” .

Pembelajaran bermanfaat untuk membuka pintu gerbang kemungkinan menjadi manusia dewasa dan mandiri, dan untuk berubah dari tidak berdaya menjadi sumber daya. Tumbuh menjadi dewasa dan mandiri, berarti semakin mengenal diri semakin jujur dengan diri sendiri, semakin otentik, dan menjadi semakin unik tak terbandingkan. Menjadi diri sendiri harus menjadi tujuan tertinggi dalam hidup pribadi seorang anak manusia. Ia harus menetapkan tujuan tersebut berdasarkan kemauan yang kuat. Belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk hanya menjadi dirinya sendiri dan bukan yang lain. Menurut Winataputra (2008), itulah jalan menuju pemberdayaan, pemerdekaan dan kedaulatan diri, sebagaimana empat pilar pendidikan *Unesco* yaitu: *Learning to know* (belajar mengetahui); *Learning to do* (belajar berbuat); *Learning to live together, learning to live with others* (belajar hidup bersama); *Learning to be* (belajar menjadi diri sendiri).

Terkait dengan proses pembelajaran PKn, kita harus memiliki nilai-nilai keberjuangan. Nilai keberjuangan itu adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Dalam sejarah, nilai keberjuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong pahlawan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nilai-nilai keberjuangan yang melandasi semangat para pejuang bangsa yang kini telah dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 harus diwariskan dan dijadikan daya dorong, pembangkit semangat kepada generasi baru. Hal tersebut bertujuan untuk membebaskan diri, keluarga dan masyarakat bangsa dari kebodohan, kemiskinan, keteringgalan dan keterbelakangan, dekadensi moral, dan melemahnya jati diri serta kepribadian bangsa.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai keberjuangan dalam kehidupan bukan sekedar diomongkan dan diajarkan, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan. Karena itu, dalam proses edukasi dan transformasi pengetahuan kewarganegaraan,

kita harus terlebih dahulu memahami, dan melakoninya dalam kehidupan. Bukan sekedar mengonsepkannya dan pandai mentransformasikan nilai-nilai itu kepada orang lain.

Nilai-nilai keberjuangan patut terus dikembangkan sampai generasi bangsa ini memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi, pendidikan kewarganegaraan pada esensinya hendak mewujudkan karakter bangsa yang kuat. Karena itu, menuntun generasi sebagai pelanjut tongkat estafet kehidupan (perjuangan) dengan: menunjukkan keteladanan, mewariskan ilmu (budaya belajar), membiasakan mengamalkan ilmu yang diketahui kepada generasi-lingkungan sosial, disiplin, bertanggung jawab, demokratis, humanis, patriotik, giat bekerja, produktif dan prospektif, tegar, tidak membiasakan mengeluh pada manusia tapi berserah dirilah pada Allah, pantang menyerah dalam berjuang. Mulailah dari yang kecil dari diri sendiri, keluarga baru ke masyarakat luas. Mejadikan semua aktivitas hidup sebagai lahan untuk meraih prestasi jihad fisabilillah. Hal-hal tersebut menjadi bagian dari obsesi nilai yang tak dapat dilepas pisahkan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Keterpautan nilai-nilai keberuangan, pengalaman edukatif, dan kearifan hidup membentuk kecerdasan intelektual, emosional dan spritual. Hal itu akan menjadi terapi dan benteng pertahanan jati diri dan kepribadian bangsa dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Pada gilirannya, akan melahirkan suatu kebangkitan sosial kultural dengan karakter keindonesiaan yang kuat. Sebagaimana dinyatakan Tommy Koh (dalam Huntington, 2009) bahwa sebuah "Renaissans kultural" sedang melanda Asia. Dari sini tumbuh keyakinan bahwa masyarakat Asia tidak harus dan terus menganggap apa yang berasal dari Barat (Amerika) adalah yang terbaik .

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan bangsa ini berada dalam percaturan budaya global. Sadar atau tidak transformasi nilai-nilai budaya global telah membawa dampak yang sangat kompleks terhadap tatanan kehidupan masyarakat bangsa. Di samping itu, krisis multidimensional yang melanda bangsa menjadi bagian yang mendesak komponen bangsa ini untuk

merajut dan merestorasi kembali tatanan sosial kultural bangsa dalam koridor falsafah dan budaya bangsa yang adiluhung, Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan krisis multi-dimensional yang melanda bangsa Indonesia, penguatan karakter bangsa menjadi satu pilihan utama. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki arti penting yang diperlukan dalam mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan. Kecerdasan kewarganegaraan perlu dikembangkan secara lintas disiplin dalam ranah keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat luas.

Pendidikan kewarganegaraan mengemban misi nilai-nilai keberjuangan, demokrasi, hukum dan HAM. Karena itu, komunitas PKn terutama para guru PKn, dosen PKn, tokoh dan kaum elite harus bisa menjadi teladan yang diandalkan. Teladan dalam hal: pemahaman dan penguasaan nilai-nilai keberjuangan; pemahaman dan penguasaan tentang isu-isu aktual kewarganegaraan terutama yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, demokrasi, politik, hukum dan HAM; serta diandalkan karena integritas, jati diri dan kepribadian yang senantiasa komitmen dan konsisten dengan apa yang diucapkan dengan perbuatannya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buwono X, Sultan Hamengku (2007) *Merajut kembali Keindonesi-
aan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djahiri, H.A. Kosasih (2006) *Esensi pendidikan Nilai Moral Dan
PKN Di Era Globalisasi, Dalam Pendidikan Nilai Moral
Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan menyambut
70 tahun Prof. Drs.H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung Labora-
torium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Huntington, Samuel P. (2009) *Benturan Antar Peradaban Dan
masa Depan Politik Dunia*, Diterjemahkan dari, *The Clash
of Civilizations and the Remaking of World Order*, oleh M.
Sadat Ismail, Jakarta Qalam, Cet. 11.
- Husaini, Adian (2005) *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni
Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*, Jakarta, Gema
Insani.

- Koesman, Soegeng (2009) *Membangun Karakter Bangsa Carut Marut dan Centang-Perenang Krisis Multi Dimensi di Era Reformasi*, Yogyakarta Lokus Tiara Wacana.
- Suryadi, Ace (2009) *Membangun Kompetensi SDM Yang mampu Bersaing di Era Global Melalui PKn* (Masalah dan Tantangannya), Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Tilaar, H.A.R. (2007) *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas bangsa Indonesia Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia.*, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca sarjana Universitas pendidikan Indonesia.